



► PENDAPATAN PAJAK

Realisasi PBB Tembus Rp41 Miliar

BANTUL—Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bantul hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp41,1 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Anggit Nur Hidayat menyebut capaian ini berasal dari berbagai wilayah yang memiliki tenggat jatuh tempo berbeda. "Jatuh tempo pembayaran PBB di Bantul tidak serentak," ucap Rabu (25/6).

Untuk wilayah seperti Kapanewon Sanden, Srandakan, Kretek, Bambanglipuro, Pundong, dan Pajangan jatuh tempo PBB di bulan Juni. Sedangkan wilayah lain seperti Sewon, Piyungan, Kasihan, dan Bantul dijadwalkan pada Agustus.

Anggit menambahkan, Bantul kini membuka lebih banyak kanal pembayaran digital PBB. Selain melalui Bank BPD DIY dan mobil layanan keliling, masyarakat juga bisa membayar PBB melalui aplikasi e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta metode QRIS dan virtual account (VA).

"Keunggulan VA ini, salah satunya bisa digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan lintas bank, seperti BCA, Mandiri, hingga bank-bank nasional lain. Ini bentuk kemudahan yang kami harapkan bisa mendorong kepatuhan," jelas Anggit.

Meski kanal digital diperluas, Pemkab tetap mempertahankan sistem jemput bola dengan mobil keliling untuk menjangkau wajib pajak yang belum familiar dengan teknologi. "Digitalisasi bukan mengganti cara lama, tapi memberi lebih banyak pilihan. Semakin mudah aksesnya, masyarakat diharapkan semakin patuh dan sadar pajak," ucap dia.

Tahun ini, BPKPAD Bantul menetapkan sebanyak 636.410 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan total nilai ketetapan mencapai Rp79,2 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti menambahkan, Pemkab Bantul sampai saat ini terus berupaya mendorong peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi layanan. (Yosef Leon)